

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR DI PKBM PERSADA BANTUL

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL POLICY OF BASIC LITERACY IN PKBM PERSADA BANTUL

Oleh : Alfrendy Tatto (12110241026), Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY
alfrendytatto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar, serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah ketua PKBM Persada, tutor dan warga belajar, dengan objek penelitian implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi. Untuk validasi data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar di PKBM Persada antara lain : (1) komunikasi, meliputi adanya sosialisasi untuk mengajak warga mengikuti pendidikan keaksaraan dasar, dan sosialisasi dari Dinas Pendidikan berupa memberikan pelatihan bagi tutor; (2) Sumber daya manusia sudah mencukupi untuk Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar, sumber daya sarana dan prasarana masih belum mencukupi karena PKBM Persada masih meminjam rumah warga setempat sebagai tempat pembelajaran, sumber daya finansial menggunakan APBD DIY dan sebagian dari swasembada PKBM Persada; (3) Disposisi, adanya komitmen dan sikap positif dari pihak PKBM untuk terus mengimplemetasikan Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar; (4) Struktur birokrasi dalam megimplementasikan Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar dengan menjadikan pendidikan keaksaraan dasar sebagai salah satu program pendidikan non formal yang diselenggarakan di PKBM Persada. Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari masyarakat setempat, perangkat desa dan dinas-dinas terkait. Faktor penghambatnya adalah kurangnya gedung untuk pelaksanaan pembelajaran dan kesibukan dari warga belajar yang sering bertabrakan dengan jadwal pembelajaran keaksaraan dasar.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Keaksaraan Dasar, PKBM Persada.*

Abstract

Purposes of this study are to described Implementation of Basic Literacy Education Policy, as well as enabling and inhibiting factors. This study is a qualitative study, subjects in this study are the chairman of the PKBM Persada, tutors and learners, with the research objective is Basic Literacy Education Policy Implementation. Data collection methods in this study are using observation, documentation, and interviews. Data analysis techniques in this study are using Miles and Huberman interactive model including data collection, data reduction, data presentation, and verification. The data validations are using source triangulation, triangulation techniques, and time triangulation. The results showed that the Basic Literacy Education Policy Implementation in PKBM Persada includes; (1) communication, including socialization to encourage citizens to follow the basic literacy education, and socialization from Department of Education in the form of providing training for tutors.; (2) Human resources are sufficient to implementation of Basic Literacy Education Policy, facility, and infrastructure resources are still inadequate because the PKBM Persada still borrow the home of local citizens for learning, financial resources are using DIY APBD and some of the financial resources coming from PKBM Persada self-sufficiency; (3) Dispositions, the commitment and positive attitude from the PKBM to citizens about the continuity the Implementation of Basic Literacy Education Policy; (4) The bureaucratic structures in Implementation of Basic Literacy Education Policy by making basic literacy education as one of the non-formal education program held at PKBM Persada. Supporting factor is the support from the local community, village, and related agencies. Inhibiting factors are the lack of buildings for learning implementation and busyness of the learners that frequently collides with basic literacy learning schedule.

Keywords: *Policy Implementation, Basic Literacy Education, PKBM Persada*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena sejatinya tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 telah memiliki kewajiban untuk memberikan dan menyediakan pendidikan yang merata dan bermutu bagi masyarakat Indonesia, agar setiap warga negara Indonesia dapat menikmati pendidikan yang berkualitas, sebagai salah satu usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan nasional. Selain berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang bermutu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang merata bagi masyarakat. Mengingat kesenjangan pendidikan di Indonesia masih terbilang tinggi, hal ini dapat dilihat dari pendidikan masih belum bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat sehingga angka buta huruf masih terbilang cukup tinggi dan perlu ada upaya dari pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan. Maka penetapan untuk menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata telah diatur dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 yang mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju

terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Penetapan ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1)”. “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11, ayat 1)”

Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar sebagai wujud dari kewajiban pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Keaksaraan Dasar sendiri adalah upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk buta aksara usia 15-59 tahun memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulisan dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri angka buta aksara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka buta aksara di DIY bagi penduduk berusia diatas 45 tahun masih 19,6 % dari total jumlah penduduk usia diatas 45 tahun. Berdasarkan data dari pra observasi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa

Yogyakarta mengenai jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang aktif di Propinsi DIY diketahui di Kota Yogyakarta terdapat 7 PKBM yang akan menangani 350 orang, dan PKK yang akan menangani 50 orang, sehingga total terdapat 400 orang buta aksara yang akan diberantas di Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Bantul, terdapat 33 PKBM yang akan menangani 2450 orang, dan PKK Bantul yang akan menangani 100 orang, sehingga total terdapat 2550 orang buta aksara yang akan diberantas di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Kulonprogo, terdapat 11 PKBM yang akan menangani 550 orang, dan PKK yang akan menangani 150 orang, sehingga total terdapat 700 orang buta aksara yang akan diberantas di Kulonprogo. di Sleman, terdapat 18 PKBM yang akan menangani 2150 orang buta aksara, dan sejumlah itulah angka buta aksara yang akan dihapus di Sleman. Terakhir, terdapat 37 PKBM di Gunungkidul yang akan menangani 2900 orang buta aksara, ditambah PKK Gunungkidul yang akan menangani 1300 orang buta aksara, sehingga total terdapat 4200 orang buta aksara yang akan diberantas di Gunungkidul. Dari masing-masing Kabupaten-Kota, apabila dijumlah maka akan terdapat sepuluh ribu orang buta aksara yang akan diberantas di DIY.

Dengan kondisi tingginya angka orang buta aksara tersebut maka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi

DIY, mengupayakan pemberantasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan keaksaraan dasar merupakan bentuk layanan bentuk pendidikan non-formal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara, agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung dan menganalisa, yang berorientasi pada kehidupan sehari – hari dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya, sehingga warga belajar dan masyarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2016 sampai february 2017. Setting penelitian di PKBM Persada Bantul.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ketua PKBM Persada, tutor keaksaraan dasar dan warga belajar pendidikan keaksaraan dasar.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Intrumen penelitian adalah peneliti.

Analisis Data

Teknik analisis data yang menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi.

Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai program keaksaraan dasar merupakan suatu wujud dari upaya pemerintah dalam menekan angka buta aksara dan upaya untuk memperluas layanan pendidikan melalui pendidikan nonformal melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIKPORA DIY) sebagai pelaksana dari kebijakan keaksaraan dasar dan sebagai penyalur dana bantuan dari pemerintah pusat untuk kabupaten/kota guna memfasilitasi pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar di lembaga-lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM Persada merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan layanan pendidikan nonformal antara lain; pendidikan keaksaraan dasar, program kejar paket A, B, dan C, Program PAUD. Dalam penelitian ini yang di fokuskan untuk diteliti adalah pendidikan keaksaraan dasar, yang merupakan wujud dari kebijakan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan di PKBM Persada.

Pendidikan keaksaraan dasar adalah suatu program pendidikan nonformal, yang ditujukan kepada masyarakat yang berusia

15-59 tahun yang masih buta aksara, agar memiliki kemampuan keaksaraan seperti membaca, menulis dan berhitung. Dalam pendidikan keaksaraan dasar juga mengajarkan mengenai berbagai macam keterampilan seperti kewirausahaan dan budidaya ternak dan budidaya tanaman. Pendidikan keaksaraan dasar diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangun masyarakat yang mandiri, demi meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat.

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar di PKBM Persada

Peneliti menggunakan teori Edward untuk menganalisis implementasi dari kebijakan pendidikan keaksaraan dasar di PKBM Persada yang melaksanakan program keaksaraan, di mana dalam teori Edward terdapat 4 aspek yang dicari yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan komunikasi antara pelaksana kebijakan dan pihak yang terkena dampak kebijakan, agar terdapat koordinasi dalam penerapan kebijakan tersebut. Adapun bentuk komunikasi yang ada adalah sosialisasi yang diadakan oleh DIKPORA dengan mengadakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) Tutor Keaksaraan Dasar yang diadakan setiap tahunnya, yang di dalamnya terdapat pelatihan pembuatan silabus, pengenalan TIK, dan pelatihan

cara belajar mengajar. Program lainnya yang diadakan oleh DIKPORA adalah pelatihan kewirausahaan membuat bagi para tutor dan warga didik PKBM. Kemudian PKBM Persada juga mensosialisasikan program keaksaraan dasar kepada masyarakat melalui RT dan perangkat desa setempat, selain itu PKBM Persada juga mengajak langsung masyarakat untuk mengikuti pendidikan keaksaraan dasar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan melek aksara dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Tenaga pendidik yang mengajar pendidikan keaksaraan dasar hanya 5 orang tutor/tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan S1, sedangkan sisanya rata-rata berlatar belakang pendidikan terakhir SMA dan setaranya. hal ini dikarenakan kebanyakan tutor yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dialihkan untuk menjadi tutor program kejar paket C. Untuk menjadi tutor keaksaraan dasar PKBM Persada tidak menentukan standar tertentu, karena tutor untuk keaksaraan dasar sendiri juga berasal dari warga setempat yang sudah dikenal oleh masyarakat sehingga

tutor tersebut lebih mudah untuk masuk kedalam masyarakat dan mensosialisasikan tentang program pendidikan keaksaraan dasar kepada mereka. Yang paling penting dari menjadi seorang tutor keaksaraan dasar adalah memiliki niat untuk mengajar dan mau berbagi ilmu kepada orang disekitarnya.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana PKBM Persada sudah memiliki beberapa fasilitas yang sudah mencukupi untuk pembelajaran keaksaraan dasar seperti adanya buku-buku materi pembelajaran dan buku bacaan milik PKBM Persada, buku tulis dan alat tulis yang dibagikan kepada warga belajar, rak buku, dan papan tulis. PKBM Persada memiliki hambatan berupa kurangnya prasarana, hal ini dikarenakan dalam pembelajaran keaksaraan dasar, PKBM Persada belum memiliki gedung tetap untuk pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan masih menggunakan rumah warga setempat yang bersedia meminjamkan rumahnya untuk tempat pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.

3. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial juga merupakan elemen penting yang menunjang implementasi kebijakan

pendidikan keaksaraan dasar. PKBM Persada menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar, adapun syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh PKBM Persada sebagai penerima bantuan dana untuk penyelenggaraan program keaksaraan dasar adalah memiliki legalitas lembaga atau izin operasional, memiliki surat keterangan domisili, memiliki rekening atas nama lembaga, memiliki NPWP atas nama lembaga, memiliki alamat yang jelas dan memiliki tutor dengan tingkat pendidikan minimal tamat SMA atau berpengalaman dalam pembelajaran peserta.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen tutor dan pengelola PKBM dalam mengimplementasikan keaksaraan dasar. Tutor/pendidik sebagai pelaksana kebijakan pendidikan keaksaraan dasar memiliki komitmen ingin membantu masyarakat yang belum melek aksara menjadi lebih mandiri melalui pendidikan keaksaraan dasar. Selain itu motivasi ini timbul karena adanya dorongan dari rasa

prihatin terhadap masyarakat yang belum melek aksara sehingga tutor ingin membantu masyarakat yang masih buta aksara agar mereka bisa membaca dan berhitung sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan agar masyarakat yang masih buta aksara dapat terhindar dari ancaman pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan ingin memanfaatkan kelemahan dari warga itu sendiri.

d. Struktur Birokrasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan keaksaraan dasar, PKBM Persada menjadikan pendidikan keaksaraan dasar sebagai salah satu program pendidikan non-formal yang ada di PKBM. Pihak PKBM wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar kepada dinas pendidikan propinsi dan kabupaten sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar. Selain itu PKBM Persada juga memiliki kerja sama dengan lembaga mitra PKBM yang berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar.

Model pembelajaran dalam pendidikan keaksaraan dasar PKBM Persada menggunakan prinsip pembelajaran berdasarkan panduan penyelenggaraan dan

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, adapun prinsip pembelajaran yang digunakan adalah: 1) partisipatif; 2) kontekstual; 3) konteks lokal; 4) kooperatif dan kolaboratif; 5) tematik; 6) desain lokal; 7) fungsional; 8) fleksibel.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar

Dalam implementasi kebijakan pendidikan keaksaraan dasar terdapat berbagai faktor pendukung, faktor-faktor pendukung tersebut antara lain adanya dukungan dari masyarakat setempat berupa memberikan pinjaman berupa gedung untuk pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, dukungan RT dan perangkat desa setempat. PKBM Persada juga mendapatkan bantuan dan dukungan berupa penyaluran APBD dari dinas pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, dukungan dari dinas-dinas setempat yang bekerjasama dengan PKBM Persada berupa memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada warga belajar, dan bantuan dari lembaga-lembaga yang ingin ikut membantu PKBM Persada dalam mensukseskan program keaksaraan dasar, dengan memberikan bantuan berupa memberikan buku bacaan kepada warga belajar.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar Keaksaraan Dasar

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan keaksaraan dasar antara lain, kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung untuk pembelajaran keaksaraan dasar, karena PKBM Persada masih meminjam rumah warga setempat sebagai tempat pembelajaran keaksaraan dasar, selain itu dari segi sarana, tidak adanya fasilitas seperti meja belajar untuk warga belajar sehingga warga belajar yang mengikuti pembelajaran keaksaraan dasar harus melantai saat KBM dilaksanakan, kurangnya bahan ajar untuk pelatihan keterampilan, dan rak buku yang masih belum dapat menampung jumlah buku yang ada. Kemudian penghambat lainnya adalah waktu dari masyarakat yang mengikuti program keaksaraan dasar, sering bertabrakan dengan kesibukan mereka seperti pekerjaan dan urusan rumah tangga warga didik, karena masyarakat yang mengikuti program keaksaraan dasar rata-rata adalah orang yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Sehingga program keaksaraan dasar terlaksana dan selesainya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pendidikan keaksaraan dasar adalah suatu kebijakan yang menjadi landasan bagi PKBM Persada untuk mengadakan pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan keaksaraan dasar merupakan layanan pendidikan nonformal yang diperuntukan bagi masyarakat yang berusia

15-59 tahun yang masih buta aksara. Dalam implementasi kebijakan pendidikan keaksaraan dasar terdapat komponen-komponen yang dikaji sebagai berikut: 1) Komunikasi, berupa sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan keaksaraan dasar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY kepada PKBM Persada dan memberikan pelatihan berupa Bimbingan Teknis Tutor Keaksaraan Dasar. Bentuk komunikasi yang lainnya adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendidikan keaksaraan dasar; 2) Sumber daya, berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya finansial menggunakan dana dari APBN yang didistribusikan melalui Dikpora DIY untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan keaksaraan dasar, dan sebagian menggunakan swasembada dari PKBM Persada; 3) Disposisi, adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh PKBM Persada dan para tutor dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan keaksaraan dasar, dengan adanya komitmen untuk terus mengimplementasikan kebijakan tersebut; 4) Struktur Birokrasi, PKBM Persada mengimplementasikan kebijakan pendidikan keaksaraan dasar dengan menjadikan pendidikan keaksaraan dasar sebagai salah satu program pendidikan nonformal yang ada di PKBM Persada.

Dalam pembelajaran keaksaraan dasar PKBM Persada menggunakan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan panduan penyelenggaraan dan pembelajaran

pendidikan keaksaraan dasar, adapun prinsip pembelajaran yang digunakan adalah: 1) partisipatif; 2) kontekstual; 3) konteks lokal; 4) kooperatif dan kolaboratif; 5) tematik; 6) desain lokal; 7) fungsional; 8) fleksibel.

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan keaksaraan dasar antara lain: Faktor Pendukung, adanya dukungan dari masyarakat serta perangkat desa setempat dalam mendukung pembelajaran keaksaraan dasar dan dukungan dari dinas-dinas terkait dalam bekerja sama dengan PKBM Persada dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan keaksaraan dasar. Sedangkan faktor penghambatnya, berupa kurangnya gedung untuk melaksanakan pembelajaran keaksaraan dasar dan jadwal pembelajaran yang sering bertabrakan dengan kesibukan warga belajar seperti urusan pekerjaan dan lain-lain, sehingga pembelajaran keaksaraan dasar berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Diharapkan untuk kedepannya PKBM Persada dapat terus mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar sebagai salah satu upaya untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan angka buta aksara. Terus memotivasi warga agar tetap belajar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri, mengembangkan pendidikan keaksaraan dasar agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi warga belajar, dan terus melakukan kerja sama dengan

dinas-dinas terkait dan masyarakat setempat untuk mengembangkan pendidikan keaksaraan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ani Irmawati. (2015). *Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Pekerja Buruh Gedang Di Pasar Giwangan*. Yogyakarta: Skripsi UNY.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Arif Rohman. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2015). *Panduan Penyelenggaraan dan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Pembinaan Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2013). *Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dunn, William.N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014. (2014). *Pendidikan Keaksaraan Dasar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Rizki Yuliani. (2016). *Implementasi Akselerasi Pendidikan Keaksaraan Dasar di PKBM Ngundi Makmur Pengasih*. Skripsi UNY.
- Saleh Marzuki. (2012). *Pendidikan Nonformal: Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi*. Bandung: Remaja Roksdaya.
- Setiawan Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Roksdaya Offset.
- Subarsono, Ag. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards. G. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar*
- Sudiyono. (2007). *Buku Ajar Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syafaruddin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, H.N.S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Usman Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.